

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, 31 Januari 2022  
Kepala Subbag Pengelola Keuangan dan  
BMN

M IKBAL TAHALUA  
NIP 197708102003121001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH MALUKU  
Jalan Sultan Babullah Nomor 17-18 Ambon 97115  
Telepon.(0911) 352803 Faximile 352807

---

### **PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, 31 Januari 2022

Kepala Subbag Pengelola  
Keuangan dan BMN

M IKBAL TAHALUA  
NIP 197708102003121001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.67.521.170 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp.59.155.064.566 atau mencapai 99.03 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.59.732.537.000

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp.93,485,886,960 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.2,026,002,870; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.90.259.467 Aset Tetap (neto) sebesar Rp.91,369,624,623; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.90,965,912 dan Rp.93,394,921,048

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah

sebesar Rp.36.195.102 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.14,286,891,201 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(14,250,696,099) Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.10.306.368 dan sebesar Rp.(0) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(14,240,389,731)

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp.47.725.507.703 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(14,240,389,731) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.105.099 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.59.909.888.021 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp.93,394,921,048

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KANTOR WILAYAH MALUKU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 dan 2020

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	58.667.665	#DIV/0!	178.220.269
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	58.667.665	#DIV/0!	178.220.269
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	8.972.116.000	8.730.314.667	97,30	8.180.568.519
Belanja Barang	B.4	5.270.926.000	4.962.522.754	94,15	3.914.603.577
Belanja Modal	B.5	45.489.495.000	45.462.227.145	99,94	1.150.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	#DIV/0!	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		59.732.537.000	59.155.064.566	99,03	12.096.322.096

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**KANTOR WILAYAH MALUKU**  
**NERACA**  
**PER 31 Desember 2021 dan 2020**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2021	2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	24.000.000	39.019.700
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	(120.000)	(195.099)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	1.995.307.870	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	6.815.000	15.000.000
Jumlah Aset Lancar		2.026.002.870	53.824.601
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11		
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13		
Jumlah Piutang Jangka Panjang			
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	42.486.357.000	42.486.357.000
Peralatan dan Mesin	C.15	8.223.065.284	6.265.811.684
Gedung dan Bangunan	C.16	5.303.038.000	5.303.038.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	331.320.267	331.320.267
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	42.806.569.035	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(7.780.724.963)	(6.759.022.391)
Jumlah Aset Tetap		91.369.624.623	47.627.504.560
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	C.21	90.713.032	96.713.032
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.22	(453.565)	(483.565)
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>		90.259.467	96.229.467
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.23	-	-
Aset Lain-Lain	C.24	1.947.395.555	2.044.395.555
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	(1.947.395.555)	(2.044.395.555)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>93.485.886.960</b>	<b>47.777.558.628</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.26	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	90.965.912	52.050.925
Pendapatan Diterima di Muka	C.28	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.29	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		90.965.912	52.050.925
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>90.965.912</b>	<b>52.050.925</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.29	93.394.921.048	47.725.507.703
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>93.394.921.048</b>	<b>47.725.507.703</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>93.485.886.960</b>	<b>47.777.558.628</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

## KANTOR WILAYAH MALUKU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	36.195.102	23.850.227
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>36.195.102</b>	<b>23.850.227</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	8.738.250.130	8.230.271.928
Beban Persediaan	D.3	179.495.751	114.404.500
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.328.591.558	2.662.559.465
Beban Pemeliharaan	D.5	406.862.725	519.810.241
Beban Perjalanan Dinas	D.6	719.053.884	1.158.135.689
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	914.637.153	1.118.603.544
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	(34.901)
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>14.286.891.201</b>	<b>13.803.750.466</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(14.250.696.099)</b>	<b>(13.779.900.239)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
D.11			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar			-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	105.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	4.775.723.842
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya		-	(4.670.723.842)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya		10.306.368	42.652.942
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	90.000
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>10.306.368</b>	<b>42.562.942</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>10.306.368</b>	<b>(4.628.160.900)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
D.12			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(14.240.389.731)</b>	<b>(18.408.061.139)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.**



**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****KANTOR WILAYAH MALUKU  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 dan 2020***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2021	2020
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	<b>47.725.507.703</b>	<b>54.322.870.549</b>
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(14.240.389.731)	(18.408.061.139)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(84.945)	(323.316.001)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	(574.648.200)
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(190.044)	251.322.199
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	105.099	10.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		59.909.888.021	12.134.014.294
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	<b>E.4</b>	<b>45.669.413.345</b>	<b>(6.597.362.846)</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.5</b>	<b>93.394.921.048</b>	<b>47.725.507.703</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis* Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Mempunyai Tugas dan Fungsi dalam Melakukan Koordinasi Dibidang Bimbingan dan Dukungan Implementasi Akuntansi Pemerintah dengan cakupan wilayah Provinsi Maluku. Melalui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku berkomitmen dengan visi dan misi:

“Masyarakat memperoleh kepastian hokum, melindungi hak asasi manusia”

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi Keuangan yang dihasilkan oleh system akuntansi berbasis akrual yang diimplemetasikan.

3. Mengembangkan system informasi yang andal dan terpecaya.

Menyelenggarakan system dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

**A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

**A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM Maluku menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan

entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat

dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

## *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan

penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:



- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah Melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan Terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilain dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan

penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan Organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa penggunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan BMN.

### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak

berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak	50

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek
 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang
 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

### *Ekuitas*

#### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan

lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp.67.521.170*

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.67.521.170 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

#### *Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	-	36.194.802	#DIV/0!
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	-	21.019.700	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	8.645.700	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		1.660.668	
Pendapatan Lain-lain	-	300	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>#REF!</b>	<b>67.521.170</b>	<b>#REF!</b>

- *Realisasi Pendapatan Sebesar Rp.36.194.802 adalah Pendapat dan sewa rumah Dinas Pegawai.*
- *Realisasi Pendapatan Sebesar Rp.21.019.700 adalah Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (setoran temuan BPK untuk 2 orang pegawai a.n Ronald Tuasun dan Adjid Taha)*
- *Realisasi Pendapatan Sebesar Rp. 8.645.600 adalah Pengembalian Belanja Pegawai Tahun yang lalu a.n Sulastyo Nugroho untuk 3 bulan.*
- *Realisasi Pendapatan Sebesar Rp. 1.660.668 adalah Pengembalian Belanja Barang Tahun yang lalu terkait temuan BPK yang masih kurang setor ke kas negara a.n Alex M tahun 2008 (ybs sudah pensiun)*
- *Realisasi Pendapatan Sebesar Rp.300 adalah Kelebihan Setoran ke kas Negara sebesar Rp.3.020.000 yang seharusnya di setor sebesar Rp.3.019.700.*

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2021 mengalami

kenaikan 0.00 persen dibandingkan TA 2020. Selain itu, Pendapatan Lain-lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	-	105.000.000	-100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	36.194.802	23.850.227	51,76
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	21.019.700	49.000.000	-57,10
Pendapatan Lain-Lain	10.306.668	370.042	2685,27
Pendapatan Lain-Lain II	300	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>67.521.470</b>	<b>178.220.269</b>	<b>-62,11</b>

**Realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp.-67,11 adalah**

1. Realisasi Pendapatan Sebesar Rp.36.194.802 adalah Pendapat dan sewa rumah Dinas Pegawai.
2. Realisasi Pendapatan Sebesar Rp. 21.019.700 adalah Pendapatan Penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak Lain/Pihak Ketiga (a.n Adjid Taha dan Ronald Tuasun)
3. Realisasi Pendapatan Sebesar Rp.10.306.368 adalah Penerimaan Kembali Belanja Pegawai dan Belanja Barang (a.n Sulastyo Nugroho dan Alex M)
4. Realisasi Pendapatan Sebesar Rp.300 adalah Kelebiha Setoran ke kas Negara

**sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp.14.370.042 adalah**

1. Realisasi Pendapatan Sebesar Rp. 105.000.000 adalah hasil dari penjual Gedung dan Bangunan Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku
2. Realisasi Pendapatan Sebesar Rp.23.850.227 adalah Pendapat dan sewa rumah Dinas Pegawai.
3. Realisasi Pendapatan Sebesar Rp. 49.000.000 adalah Pendapatan Penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak Lain/Pihak Ketiga (a.n Adjid Taha dan Ronald Tuasun)
4. Realisasi Pendapatan Sebesar Rp.370,042 adalah Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang lalu

**Realisasi Belanja Negara**

**Rp.59.155.064.566**

**B.2 Belanja**

Realisasi Belanja instansi pada TA 2021 adalah sebesar Rp.59.155.064.566 atau 99.03% dari anggaran belanja sebesar Rp.59.732.537.000 Rincian

anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021*

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	8.972.116.000	8.730.314.667	97,30
Belanja Barang	5.270.926.000	4.962.522.754	94,15
Belanja Modal	45.489.495.000	45.462.227.145	99,94
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>59.732.537.000</b>	<b>59.155.064.566</b>	<b>99,03</b>
Pengembalian		(2.146.943)	-
<b>Jumlah</b>	<b>59.732.537.000</b>	<b>59.152.917.623</b>	<b>99,03</b>

**Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2021 adalah Rp.59.152.917.623 atau 99.03% adalah ;**

1. Belanja pegawai karna adanya kenaikan pangkat
2. Belanja Barang dari Perjalanan dinas, honorarium dan Belanja Sewa Gedung dan Sewa Kendaraan Roda Empat
3. Belanja Modal dari Belanja Peralatan dan Mesin (Kendaraan Roda dua dan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Baru)
4. Belanja Modal gedung dan bangunan kanwil maluku
5. Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
6. Belanja Barang Persediaan konsumsi dan Penanganan Pandemi Covid-19

Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 389.03% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain :

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	8.730.314.667	8.180.568.519	6,72
Belanja Barang	4.962.522.754	3.914.603.577	26,77
Belanja Modal	45.462.227.145	1.150.000	3.953.137
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>59.155.064.566</b>	<b>12.096.322.096</b>	<b>389,03</b>



*Belanja Pegawai*      **B.3 Belanja Pegawai**

*Rp.8.730.314.667*

Realisasi Belanja Pegawai TA 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.8.730.314.667 dan Rp.8.180.568.519 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS Realisasi belanja TA 2021 mengalami Kenaikan sebesar 6.72 persen dibandingkan dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan Pangkat Pegawai dan pembayaran kekurangan kenaikan pangkat pegawai dan tunjangan.

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020*

<b>URAIAN</b>	<b>REALISASI TA 2021</b>	<b>REALISASI TA 2020</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.630.115.546	7.177.616.722	6,30
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	#DIV/0!
Belanja Pembulatan Gaji PNS	97.064	88.728	9,40
Belanja Lembur	37.243.000	34.405.000	8,25
Belanja Uang Makan PNS	1.065.006.000	968.459.000	9,97
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>8.732.461.610</b>	<b>8.180.569.450</b>	<b>6,75</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(2.146.943)	(931)	230.506
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8.730.314.667</b>	<b>8.180.568.519</b>	<b>6,72</b>

*Belanja Barang*      **B.4 Belanja Barang**

*Rp.4.962.522.754*

Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.4.962.522.754 dan Rp.3.914.603.577 Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan 135.17% dari Realisasi Belanja Barang TA 2020.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.314.171.318	1.142.425.911	15,03
Belanja Barang Non Operasional	545.335.990	217.236.700	151,03
Belanja Jasa	1.805.788.086	620.846.736	190,86
Belanja Pemeliharaan	407.722.725	510.905.541	(20,20)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.962.522.754	1.158.135.689	328,49
Belanja Persediaan	170.450.751	265.053.000	(35,69)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>9.205.991.624</b>	<b>3.914.603.577</b>	<b>135,17</b>
Pengembalian Belanja	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.205.991.624</b>	<b>3.914.603.577</b>	<b>135,17</b>

- Realisasi Belanja Barang TA 2021 lebih besar dari TA 2020 hal ini antara lain disebabkan karena belanja barang, belanja Pemeliharaan, belanja barang persediaan dan Belanja Jasa untuk penanganan pandemi COVID-19 selama semester 1 tahun 2021.

### *Belanja Modal*

*Rp.45.264.227.145*

### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.45.264.227.145 dan Rp.1.150.000 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.028.033.600	1.150.000	89294,23
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.434.193.545	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>45.462.227.145</b>	<b>1.150.000</b>	<b>3953137,14</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>45.462.227.145</b>	<b>1.150.000</b>	<b>3953137,14</b>

#### **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Realisasi tersebut pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen dibandingkan TA 2020.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

*Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin  
Rp.1.028.033.600*

### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp.1.028.033.600, mengalami kenaikan sebesar 89.2 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp.1.150.000.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Penanganan pandemi COVID-19	0	1.150.000	-100,00
Peralatan dan Mesin	1.028.033.600	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.028.033.600</b>	<b>1.150.000</b>	<b>89294,23</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.028.033.600</b>	<b>1.150.000</b>	<b>89294,23</b>

- *Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin tahun 2021 sebesar Rp.1.028.033.600 dengan rincian sebagai berikut:*

1. *Kendaraan Roda Dua (2 buah) Rp.57.200.000*
2. *Filling Cabinet Besi (10 buah) Rp.23.650.000*
3. *Meja Kerja Kayu (32 buah) Rp.270.160.000*
4. *Kursi Besi/Metal (2 buah) Rp.4.648.600*
5. *A.C Split (2 buah) Rp.58.630.000*
6. *Sound System (1 buah) Rp. 39.160.000*
7. *Handy Cam (1 buah) Rp.6.600.000*
8. *Kamera Udara (1 buah) Rp.26.400.000*
9. *P.C Unit (20 buah) Rp.207.240.000*
10. *Lap Top (23 buah) Rp.235.501.000*
11. *Printer (23 buah) Rp.61.985.000*
12. *Scanner (4 buah) Rp.36.960.000*

- *Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebesar Rp.1,150,000 adalah Thermogun .*

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal TA 2021 Rp.45.462.227.145 dan TA 2020 Rp.0. Realisasi Belanja Modal TA 2021

mengalami kenaikan sebesar 100.00 persen dibandingkan Realisasi TA 2020.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A 2020	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	45.462.227.145	0	100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>45.462.227.145</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>

- Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp.45.462.227.145 adalah pembangunan gedung dan bangunan kantor wilayah maluku

**B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mendukung rencana strategis.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

**B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen dibandingkan Realisasi

TA 2020.

*Belanja Bantuan Sosial Rp.0.* **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A 2020	NAIK (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	0	0	#DIV/0!
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0.,*

**C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2021 dan 2020*

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Uang Tunai	-	-
Bank Mandiri KC Ambon Pattimura	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

- *Saldo Kas pada Uang Tunai dan Bank di rekening bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 Rp.0., dan Rp.0.,*

*Kas di Bendahara Penerimaan Rp.0*

## **C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2021 dan 2020*

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Uang Tunai	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0.*

## **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2021 dan 2020*

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Piutang PNB*  
*Piutang PNB Rp.0.*

## **4 Piutang PNB**

Saldo Piutang PNB per tanggal per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan

pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBPN disajikan disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBPN TA 2021 dan 2020*

Uraian	TH 2021	TH 2020
Piutang PNBPN	-	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Bagian Lancar* **5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

*TP/TGR*

*Rp.24.000.000*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal Per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.24.000.000, dan Rp.39,019,700. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

No	Nama	TH 2021	TH 2020
1	Pak Adjid Taha	-	39.019.700
2	Ronald Tuasun	24.000.000	
<b>Jumlah</b>		<b>24.000.000</b>	<b>39.019.700</b>

*Bagian Lancar* **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

*TPA*

*Rp.0.*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA TA 2021 dan 2020*

No	Nama	TH 2021	TH 2020
1	-	-	-
2	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

*Penyisihan*

*Piutang Tak*

*Tertagih -*

*Piutang Lancar*

*Rp.(120.000)*

**C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.(120.000) dan Rp.(195,098) Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut;

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar  
TA 2021 dan 2020*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	120.000	0,50%	600
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>120.000</b>		<b>600</b>
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>120.000</b>		<b>600</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>120.000</b>		<b>600</b>



*Belanja  
Dibayar di  
Muka  
Rp.1.995.307.8  
70.*

### **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka Tahun Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.1.995.307.870., dan Rp.0., Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2021 dan 2020*

Jenis	TH 2021	TH 2020
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	367.683.360	-
Belanja Modal Dibayar Dimuka	1.627.624.510	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.995.307.870</b>	<b>-</b>

*Pendapatan  
yang Masih  
Harus  
Diterima Rp.0*

### **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus  
Diterima TA 2021 dan 2020*

Jenis	TH 2021	TH 2020
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Persediaan  
Rp.6.815.000*

### **C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.6.815.000 dan Rp.15.000.000 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2021 dan 2020

Jenis	TH 2021	TH 2020
Barang Konsumsi	6.815.000	15.000.000
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.815.000</b>	<b>15.000.000</b>

- Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan  
TP/TGR  
Rp.90.713.032

**C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.90.713.032 dan Rp.96,713,032. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 dan adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2021 dan 2020*

No	Debitur	TH 2021	TH 2020
1	Ronald Tuasun	90.713.032	96.713.032
2	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>90.713.032</b>	<b>96.713.032</b>

Tagihan  
Penjualan

**C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember

*Angsuran  
Rp.0.*

2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA TA 2021 dan 2020*

No	Debitur	TH 2021	TH 2020
1		-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang  
Jangka  
Panjang  
Rp.(453.565)*

### **C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. (453.565) dan Rp.(483,566). Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2021*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	453.565	0,50%	2.268
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>453.565</b>		<b>2.268</b>
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>453.565</b>		<b>2.268</b>

Tanah  
Rp.42,486,357,00  
0

### C.14 Tanah

Tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.42,486,357,000 dan Rp.42,486,357,000 Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b>	<b>42.486.357.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Selisih revaluasi aset	
Hibah	-
Reklasifikasi	
Mutasi kurang:	
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yang tidak ditemukan	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>	<b>42.486.357.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>42.486.357.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Tanah TA 2021*

No	Luas	Lokasi
1	850 m2	Jl. Sultan Babullah No 17-18 Ambon
2	5,000 m2	Jl. Ir.M.Putuhena Poka Ambon
3	30,000 m2	Tiakur Kabupaten MBD
4	30,000 m2	Sifanan Kec. Tanimbar Selatan Kab. MTB
5	1,325 m2	Jl. Petra Karpan
6	3000 m2	Jl. Karel Satsuitubun Passo
7	600 m2	Jl. Dr. Malaiholo Air Salobar
8	10000 m2	Jl. Karel Satsuitubun Passo
9	200 m2	Jl.Pintu Ina Karpan
10	1146 m2	Jl. Pintu Ina Karpan
11	400 m2	Jl. Dr. Malaiholo Air Salobar
12	168 m2	Gadihu
13	168 m2	Gadihu
14	168 m2	Gadihu
15	150 m2	Passo
16	6000 m2	Passo
<b>Jumlah</b>		

Peralatan dan  
Mesin  
Rp.,8,223,065,28  
4

### C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.8,223,065,284 dan Rp.6.265.811.684 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>6.265.811.684</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.028.033.600
Transfer Masuk	822.344.625
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	0
Transfer keluar	0
Koreksi Pencatatan Nilai / Kuantitas	107.065.419
Penghentian dari penggunaan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>1.957.443.644</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>1.957.443.644</b>

- **Pembelian Peralatan dan Mesin nominal sebesar Rp.1.028.033.600 adalah sebagai berikut:**
  1. Kendaraan Roda Dua (2 buah) Rp.57.200.000
  2. Filling Cabinet Besi (10 buah) Rp.23.650.000
  3. Meja Kerja Kayu (32 buah) Rp.270.160.000
  4. Kursi Besi/Metal (2 buah) Rp.4.648.600
  5. A.C Split (2 buah) Rp.58.630.000
  6. Sound System (1 buah) Rp. 39.160.000
  7. Handy Cam (1 buah) Rp.6.600.000
  8. Kamera Udara (1 buah) Rp.26.400.000
  9. P.C Unit (20 buah) Rp.207.240.000
  10. Lap Top (23 buah) Rp.235.501.000
  11. Printer (23 buah) Rp.61.985.000
  12. Scanner (4 buah) Rp.36.960.000
- **Transfer Masuk sebesar Rp.823.801.000**
  1. 1 Buah Laptop Peralatan dan mesin sebesar Rp. 11.651.000 Dari Balitbang HAM
  2. 23 Bua P.C Unit Rp.219.943.640 dari Satker Kanwil Ditjen AHU 408893
  3. 25 Buah Lap Top Rp.278.357.360 Satker Kanwil Ditjen AHU 408893
  4. 24 Buah Printer Rp.78.714.899 Satker Kanwil Ditjen AHU 408893
  5. 23 Buah Scanner Rp.246.785.101 Satker Kanwil Ditjen AHU 408893
- **Koreksi Pencatatan Nilai / Kuantitas sebesar Rp.107.065.419**
  1. Station Wagon Sebesar Rp.97.000.000
  2. Meja Kerja Kayu Sebesar Rp.8.419.000
  3. Laptop Sebesar Rp.1.456.375
  4. Printer Sebesar Rp.190.044

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp.5,303,038,000*

### **C.16 Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan per 30 September 2021 dan Per 2020 adalah Rp.5,303,038,000 dan Rp.5,303,038,000 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>5.303.038.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Koreksi Semua Hasil Penilaian kembali	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali	-
<b>Mutasi kurang:</b>	-
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yang tidak ditemukan	-
Penghentian Aset dari penggunaan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>5.303.038.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>5.303.038.000</b>

*Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp.0.*

### **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp.0. dengan rincian sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b>	<b>-</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
<b>Mutasi kurang:</b>	-
Reklasifikasi Keluar	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>-</b>

*Aset Tetap Lainnya Rp.331.320.267*

### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.331.320.267 dan Rp.331.320.267 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b>	<b>331.320.267</b>
Mutasi tambah:	0
Transfer Masuk	0
Penghentian Aset dari Penggunaan	0
<b>Saldo per 30 Desember 2021</b>	<b>331.320.267</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>331.320.267</b>

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp.42.806.569.  
035*

### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.42.806.569 dan Rp0

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp.(7.780.724.96  
3)*

### **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp.(7.780.724.963) dan Rp.(6,759,022,391) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
TA 2021 dan 2020*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	8.223.065.284	6.330.094.958	1.892.970.326
2	Gedung dan Bangunan	5.303.038.000	1.450.630.005	3.852.407.995
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>13.526.103.284</b>	<b>7.780.724.963</b>	<b>5.745.378.321</b>

*Aset Tak  
Berwujud Rp.0.*

### **C.21 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September 2021 dan 2020 Rp.0. dan Rp.0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 30 Juni 2021</b>	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2021	-
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2021</b>	-

*Aset Lain-Lain*  
*Rp.1,947,395,5*  
*55*

### **C.22 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.1.947.395.555 dan Rp.2,044,395,555,. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>1.947.395.555</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>1.947.395.555</b>
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>1.947.395.555</b>

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi*  
*Penyusutan*  
*dan Amortisasi*  
*Aset Lainnya*  
*Rp.(1.947.395.5*

### **C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp.(1.947.395.555) dan Rp.(6.759.022.391). Akumulasi



55)

Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0		
Software	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aset Lain-lain	1.947.395.555	1.947.395.555	0
<b>Jumlah</b>	<b>1.947.395.555</b>	<b>1.947.395.555</b>	<b>0</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari KPPN Rp.0*

#### **C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 dan masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp.91.116.610*

#### **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp.91.116.610, dan Rp.52,050,925 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*RincianUtang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Uang Makan Pegawai sisa bulan desember	58.064.000	dibayarkan di bulan januari 2022
Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat a.n Boedi Prayitno bulan Oktober s/d Desember 2020	1.094.997	
Kekurangan Gaji Kenaikana Pangkat Pengabdian a.n Boedi Prayitno bulan November 2021	596.414	
Kekurangan Gaji Kenaikana Pangkat Pengabdian a.n Lissa Kiesya bulan November 2021	230.886	
Biaya Langganan Listrik 3 Bulan	30.979.524	
<b>Total</b>	<b>90.965.821</b>	

*Pendapatan  
Diterima di  
Muka  
Rp.0.*

### **C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Beban yang  
Masih Harus  
Dibayar Rp.0*

### **C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 dan 2020 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar  
TA 2021 dan 2020*

Uraian	TH 2021	TH 2020
	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Ekuitas  
Rp.93.425.813.222*

### **C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.93.425.813.222 dan Rp.47.725.507.703 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan PNB* **D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

*Rp.67.521.170* **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.67.521.170 dan Rp.178.220.269. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2021 dan 2020*

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	10.306.668	0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>10.306.668</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

*Beban Pegawai* **D.2 Beban Pegawai**

*Rp.8.738.250.130*  
*30*

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.8.738.250.130 dan Rp.8.230.271.928. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai TA 2021 dan 2020*

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	5.942.485.240	5.649.132.982	5
Beban Tunjangan-tunjangan	1.680.718.789	1.532.823.337	10
Beban Pembulatan Gaji PNS	97.101	87.609	11
Beban Uang Makan PNS	1.077.706.000	1.013.823.000	
Beban Lembur	37.243.000	34.405.000	8
<b>Jumlah</b>	<b>8.738.250.130</b>	<b>8.230.271.928</b>	<b>6</b>

*Beban  
Persediaan  
Rp.179.495.751*  
1

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.179.495.751 dan Rp.114.404.500 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Beban Persediaan TA 2021 dan 2020*

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	179.495.751	114.404.500	57
Beban Persediaan pita cukai, materai dan legas	-	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	-		#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>179.495.751</b>	<b>114.404.500</b>	<b>57</b>

*Beban Barang  
dan Jasa  
Rp.3.328.591.558*

### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.3.328.591.558 dan Rp.2.662.559.465 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 dan

2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	875.248.784	739.330.011	18,38
Beban Penambahan Daya Tahan Tubuh	0	3.286.800	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	3.483.500	3.056.000	
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	238.700.000	197.514.000	20,85
Beban Barang Operasional Lainnya	193.576.124	187.931.500	
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	3.162.910	11.307.600	
Beban Bahan	175.085.390	124.621.700	40,49
Beban Honor Output Kegiatan	97.300.000	42.300.000	130,02
Beban Barang Non Operasional Lainnya	191.350.600	49.515.000	286,45
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	81.600.000	800.000	
Beban Langganan Listrik	126.979.140	87.273.042	45,50
Beban Langganan Telepon	0	0	#DIV/0!
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	#DIV/0!
Beban Sewa	1.250.843.360	952.895.118	31
Beban Jasa Profesi	22.200.000	47.050.000	(52,82)
Beban Jasa Lainnya	35.956.250	31.678.694	13,50
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	33.105.500	184.000.000	
<b>Jumlah</b>	<b>3.328.591.558</b>	<b>2.662.559.465</b>	<b>25,01</b>

*Beban*

*Pemeliharaan*

*Rp.406.862.72*

*5*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.406.862.725 dan Rp.519.810.241 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.686.000	12.000.000	39,05
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	386.176.725	473.905.641	(18,51)
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	4.000.000	33.904.600	(88,20)
<b>Jumlah</b>	<b>406.862.725</b>	<b>519.810.241</b>	<b>(21,73)</b>

*Beban  
Perjalanan  
Dinas  
Rp.719.053.884  
4*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.719.053.884 dan Rp.778.360.603. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	616.003.884	699.089.689	-11,88
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	103.050.000	82.500.000	24,91
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	376.546.000	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>719.053.884</b>	<b>1.158.135.689</b>	<b>-37,91</b>

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp.0*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada

Masyarakat untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

*Beban Bantuan Sosial Rp.0*

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.914.637.153*

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.914.637.153 dan Rp.1.118.603.544. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat

aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan 2020*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	593.445.860	643.356.644	(7,76)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	321.191.293	321.191.292	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-	154.055.608	(100)
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>914.637.153</b>	<b>1.118.603.544</b>	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>914.637.153</b>	<b>1.118.603.544</b>	<b>(18)</b>

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp.0*

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.(34.901) Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan ganti rugi	0	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/Tuntutan ganti rugi	0	34.901	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>34.901</b>	<b>(100,00)</b>



Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp.10.306.368

## D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.10.306.368 dan Rp.42,344.742 terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

### Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak lain/Pihak Ketiga	0	42.019.700	(100,00)
Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL	8.645.700	370.042	2236,41
Penerimaan kembali Belanja Barang TAYL	1.660.668		
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	263.200	(100,00)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	-90.000	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>10.306.368</b>	<b>42.562.942</b>	<b>76</b>

*\*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa  
Rp.0

## D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

### Rincian Pos Luar Biasa TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	36.195.102	23.850.227	51,76
Beban Perjalanan Dinas	719.053.884	1.158.135.689	(37,91)
Beban Persediaan	179.495.751	114.404.500	56,90
<b>Jumlah</b>	<b>934.744.737</b>	<b>1.296.390.416</b>	<b>(27,90)</b>

## **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### *Ekuitas Awal*

*Rp.47.725.507.703*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.47.725.507.703 dan Rp.54,322,870,549

### *Defisit LO*

*Rp.(14.240.389.731)*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.(14.240.389.731) dan Rp.(18.408.061.139) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### *Penyesuaian*

#### *Nilai Aset*

*Rp0*

### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

### *Koreksi Nilai*

#### *Persediaan*

*Rp.0*

### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 31 Penyesuaian 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

<b>Jenis Persediaan</b>	<b>Koreksi</b>
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Selisih

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset  
Tetap Rp.(0)

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.(0) dan Rp.(0) Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

Koreksi Aset  
Tetap Non  
Revaluasi  
Rp.(190.044)

### E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.(190.044) dan Rp.251.322.199 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	-
Gedung dan Bangunan	-
Jaringan	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Lain-  
Lain  
Rp.105.099

### E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.105.099 dan Rp.10.000. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Koreksi Lain-Lain*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Penyisihan Piutang	105.099
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
<b>Jumlah</b>	<b>105.099</b>

## Transaksi

### Antar Entitas

Rp.59.909.888.02

1

## E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.59.909.888.021 dan Rp.12.134.014.294. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

### Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	59.155.064.566
Diterima Dari Entitas Lain	(67.521.170)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	822.344.625
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>59.909.888.021</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari

### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp(67.521.170) sedangkan DKEL sebesar Rp.59.155.064.566

### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.822.344.625 terdiri dari:

### E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian

### **Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0-. dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2020.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-	Uang	Rp -
2	-	Barang	Rp -
<b>Total Pengesahan</b>			<b>Rp -</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
<b>Jumlah</b>			<b>Rp -</b>

*Ekuitas Akhir*

*Rp.93.394.921.048*

### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp.93.394.921.048 dan Rp.47.725.507.703

## **F. PENGUNGKAPAN - PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

- Adanya Kesalahan dalam Setoran di Pendapatan yaitu terjadi kelebihan setor Senilai Rp.3.020.000 yang seharusnya Senilai Rp.3.019.700 sehingga terjadi selisih senilai Rp.300 dan telah dilakukan Ralat dalam kelebihan setor di KPPN Ambon, Namun sampai dengan saat ini data belum berubah dari E-rekon dan OM Span masih membaca Rp.3.020.000 dan pada Neraca Nilainya belum berubah.
- Adanya sisa Piutang Tagihan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi a.n Ronald Tuasun yang masih belum di setor. YBS pensiun mulai dari bulan Mei s/d Desember 2021 yang nominal masih terbaca di Neraca SAIBA sebesar Rp.90.259.467. yang harusnya di setor temuan Inspektorat Jendersl setiap bulan sebesar Rp.2.000.000 dan setelah pensiun YBS tidak memenuhi kewajiban untuk menyetorkan ke KAS Negara dan telah kami lakukan permohonan pemotongan ke pihak taspen tapi jawaban dari pihak taspen tidak punya hak untuk memotong uang pensiun YBS untuk setoran temuan tiap bulannya.
- Adanya belanja bayar dimuka yaitu sewa pakai gedung untuk operasional Kantor Wilayah Maluku di Gedung Islamic Center Ambon Selama 2 Tahun yaitu dari tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 Senilai Rp.735.366.720. yang sudah berjalan selama 1 tahun dari tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 Rp.367.683.360.
- Adanya Konstruksi dalam pengerjaan yaitu gedung kantor wilayah yang sudah berjalan pembangunannya 96,337% per 31 Desember 2021. Dan Progres per tanggal 14 Januari 2022 97.749%.
- Adanya aset tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah sebesar Rp.1.947.395.555 yaitu Penghapusan Aset Kanwil Maluku yang sudah di usulkan ke Eselon I tetapi adanya Penolakan yang harus di rubah dikarenakan ada aturan baru yang harus diusulkan Penghapusan dengan mengikuti aturan baru dari Eselon I.

## **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

- Pembelian Peralatan dan Mesin Berupa 2 Unit Kendaraan Roda Dua Yamaha AEROX 155 VVA Tahun 2020 Senilai Rp.57.200.000
  
- Pembelian Peralatan Dan Mesin Senilai Rp.970.833.600 Rician Sebagai Berikut :
  1. Filling Cabinet Besi 10 Buah Rp.23.650.000
  2. Meja Kerja Kayu 32 Buah Rp.270.160.000
  3. Kursi Besi/Metal 2 Buah Rp.4.648.600
  4. A.C Split 2 Buah Rp.58.630.000
  5. Sound System 1 Buah Rp.39.160.000
  6. Microphone 1 Buah Rp.11.550.000
  7. Handy Cam 1 Buah Rp.6.600.000
  8. Kamera Udara 1 Buah Rp.26.400.000
  9. P.C Unit 20 Buah Rp.207.240.000
  10. Lap Top 23 Buah Rp.235.501.000
  11. Printer 23 Buah Rp. 61.985.000
  12. Scanner 4 Buah Rp.36.960.000
  
- Transfer Masuk dari BPHN Peralatan dan Mesin Rp.11.651.000
- Transfer Masuk Peralatan dan Mesin dari Ditjen AHU Rp.812.150.000 Berupa :
  1. P.C Unit 23 Buah Rp.219.943.640
  2. Lap Top 25 Buah Rp.278.357.360
  3. Printer (Peralatan Personal Komputer) 24 Buah Rp.78.714.899
  4. Scanner (Peralatan Personal Komputer) 23 Buah Rp.246.785.101
  
- Belanja yang masih harus di bayar yaitu Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :
  1. Belanja Uang Makan Pegawai sisa bulan Desember tahun anggaran 2021 sebesar Rp.58.064.000 untuk 127 Pegawai.
  2. Belanja Pegawai, kekurangan kenaikan pangkat a.n Boedi Prayitno bulan Oktober s/d November 2020 sebesar Rp.1.007.400
  3. Belanja Pegawai, kekurangan kenaikan pangkat pengabdian a.n Boedi Prayitno bulan november 2021 sebesar Rp.523.800
  4. Belanja Pegawai, kekurangan kenaikan pangkat pengabdian a.n Lissa Kiessya bulan november 2021 sebesar Rp.202.800

- Sewa Pakai Gedung Islamic Center Untuk Keperluan Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Senilai Rp.735.366.720
- Pengadaan Paket Sewa Kendaraan Operasional Perkantoran pada Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp.776.160.000
- Pembelian Kebutuhan Belanja COVID-19 yaitu Obat-obatan Vitaminc Penambah Daya tahan tubuh, Hand Sanitiser, Masker dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/Imun Senilai Rp.50.000.000.
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp.8.645.700 karena ada pegawai yang mengundurkan diri dari PNS yang telah terbayarkan Gaji 3 bulan YBS dikarenakan SK Pemberhentiannya terlambat di dapatkan dari Pembuat daftar gaji dan telah di buatkan gaji sampai bulan oktober yang tanggal SK Pemberhentiannya 01 agustus 2021.
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp.1.660.668 yaitu adanya salah perhitungan dalam temuan BPK di Tahun Anggaran 2008 - 2009 dan dihitung kembali masih ada yang harus di bayar sesuai nominal tersebut
- Pembelian/Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Rp.181.412.000



Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan

**Kantor Wilayah Maluku**  
**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,**  
**Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada 30 September**  
**2021**

**- TERLAMPIR-**